

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PARTISIPASI
PENYUSUNAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS TERHADAP
KINERJA MANAJERIAL DAN KINERJA ANGGARAN PADA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
BANJARMASIN**

Muhammad Ramadhan

STIE Pancasetia

*Korespondensi : ramadhan@stiepancasetia.ac.id

Diterima: 04 12 2024

Disetujui: 22 12 2024

Diterbitkan: 29 01 2025

Abstract

This study aims to examine the Influence of Clarity of Budget Targets, Participation in Budget Preparation, Accountability on Managerial Performance and Budget Performance as intervening variables on employees of the Women's Empowerment and Child Protection Service of Banjarmasin City. The population in this study was 53 civil servants, data was taken from questionnaires distributed to respondents. Data were analyzed using SmartPLS Version 3. The results of this study are Clarity of budget targets affects Managerial performance, Participation in budget preparation affects managerial performance, Accountability affects managerial performance, Clarity of budget targets affects Budget performance, Participation in budget preparation affects Budget performance, Accountability affects Budget performance, Managerial performance affects budget performance, Managerial performance mediates the influence of clarity of budget targets on budget performance, Managerial performance mediates the influence of participation in budget preparation on budget performance, Managerial performance mediates the influence of accountability on budget performance at the Women's Empowerment and Child Protection Service of Banjarmasin City

Keywords: Budget Targets, Participation, Budgeting, Accountability, Managerial Performance, Budget Performance

1. PENDAHULUAN

Pada dewasa ini di Sektor Publik khususnya mengalami perkembangan Pemerintahan yang cukup pesat dimana telah adanya Desentralisasi yang menuntut setiap Daerah mampu mengelola Daerahnya sendiri begitu pula dalam Penyusunan Anggaran. Terdapat perbedaan Anggaran dengan sektor swasta yakni Anggaran pada Sektor Publik terkait dengan proses penentuan jumlah Alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Dana organisasi yang diperoleh oleh Sektor Publik berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan milik Daerah atau Negara, pinjaman Pemerintah berupa utang Luar Negeri dan obligasi Pemerintah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Adanya kewajiban Pemerintah, baik di Pusat dan Daerah, untuk menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance Government*) menyebabkan Pemerintah berupaya untuk selalu menyajikan kinerja anggaran yang baik dan mampu dipertanggungjawabkan pada setiap kegiatan yang dilakukan. Keuangan sebagai salah satu hal yang dituntut untuk transparan dan dapat dipertanggungjawabkan harus memiliki nilai tertentu dalam laporan sebagai ukuran dan informasi sejauh mana kinerja keuangan pemerintahan berjalan layak dan semestinya. Nilai informasi laporan keuangan dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2016).

Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah merupakan isu yang saat ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat dan mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan Instansi Pemerintah. Tuntutan Akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun Daerah menyebabkan seluruh Instansi Pemerintah menyusun perencanaan strategik, melakukan pengukuran kinerja dan melaporkannya. Kinerja Manajerial adalah kemampuan atau prestasi kerja yang telah dicapai oleh para personel atau sekelompok

orang dalam suatu organisasi, untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawab mereka dalam menjalankan operasional perusahaan.

Seseorang yang memegang posisi Manajerial diharapkan mampu menghasilkan Kinerja Manajerial yang berbeda dengan Kinerja karyawan. Pada umumnya Kinerja karyawan bersifat konkrit, sedangkan Kinerja Manajerial bersifat abstrak dan kompleks. Manajer menghasilkan Kinerja dengan mengarahkan bakat dan kemampuan, serta usaha beberapa orang lain yang berada dalam daerah wewenangnya.

Ada beberapa faktor yang diduga penyebab Kinerja Pemerintah Daerah rendah diantaranya karena sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah dimulai dalam proses Perencanaan dan Penganggaran APBD, pelaksanaan/penatausahaan APBD, pertanggungjawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan APBD dan pengawasan. Dalam proses Penganggaran, pemerintah daerah selalu mengalami keterlambatan di dalam pengesahan perda APBD. Keterlambatan ini menyebabkan banyak program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk tahun Anggaran berjalan sehingga terjadi keterlambatan pembangunan daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang harus disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyusunan APBD itu sendiri merupakan suatu proses yang panjang melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan penjarangan aspirasi masyarakat yang kemudian dibahas melalui Rapat koordinasi Pembangunan (Rakorbang) pada tiap tingkatan.

Sebagai organisasi Sektor Publik, Pemerintah Daerah dituntut untuk memiliki Kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, disamping itu pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan pembagian tugas yang baik pada pemerintahan yang ada di lingkungan daerah tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi tersebut diajukan kepada pertanggungjawaban yang

diberikan oleh penyelenggara Negara yang diamanatkan kepada mereka (Afrina, 2015). Faktor yang dapat mempengaruhi Kinerja Manajerial yaitu salah satunya adalah Kejelasan dalam menentukan Sasaran suatu Anggaran. Kejelasan Sasaran Anggaran menggambarkan luasnya tujuan Anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik serta dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya. Kejelasan tujuan Anggaran merupakan hal yang paling penting dalam pencapaian suatu tujuan organisasi karena akan menentukan arah tujuan suatu organisasi.

Tujuan Anggaran yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan, tekanan dan ketidakpuasan dari karyawan yang akan berdampak buruk terhadap Kinerja Manajerial (Suyanto, 2011). Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan sejauh mana tujuan Anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar Anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian Anggaran tersebut. Kejelasan Sasaran Anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun Anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai Instansi Pemerintah. Aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi (Amril, 2014).

Disamping kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Penyusunan Anggaran juga dapat meningkatkan Kinerja Manajerial SKPD. Partisipasi Penyusunan Anggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh seseorang dalam proses Penyusunan Anggaran. Partisipasi Penyusunan Anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan prestasi (Kinerja) yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Adanya partisipasi mendorong setiap Manajer untuk meningkatkan prestasinya dan menganggap bahwa target organisasi adalah merupakan target pribadinya juga. Sebagai organisasi Sektor Publik, Pemerintah Daerah dituntut agar memiliki Kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong Pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada Pemerintah tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. S

Selain Kejelasan dalam menentukan Sasaran Anggaran dan Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, untuk meningkatkan Kinerja Manajerial juga diperlukan Akuntabilitas yang baik untuk meningkatkan Kinerja Manajerial dalam suatu organisasi. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil Kinerjanya (Penny Kusumastuti, 2014).

Objek penelitian ini adalah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin. Adapun fenomena yang terjadi saat ini, ialah dimana kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran dan juga akuntabilitas pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin terdapat beberapa permasalahan, masalah pertama pada kejelasan sasaran anggaran, diketahui bahwa sebelum melakukan perencanaan anggaran maka Staf bendahara di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin harus melakukan rincian anggaran dan rencana apa yang akan dilakukan untuk anggaran tersebut, namun diketahui bahwa bendahara pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin belum melaksanakan perencanaan anggaran dengan baik, dikarenakan masih ada ketidakjelasan sasaran anggaran yang akan dilakukan, misalnya saja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin hendak melaksanakan pembangunan pada suatu daerah namun ternyata anggaran yang diberikan tidak sesuai, karena pada awal perencanaan staf bendahara tidak menjabarkan keperluan yang harus dipenuhi.

Permasalahan selanjutnya ialah partisipasi penyusunan anggaran, dimana staf bendahara hanya melakukan penyusunan anggaran sendiri, sehingga laporan anggaran tidak dapat diserahkan kepada Kepala Dinas tepat waktu, hal tersebut dikarenakan Kasubbag keuangan jarang membantu staf bendahara dalam penyusunan anggaran, hendaknya Kasubbag keuangan dapat berpartisipasi atas penyusunan anggaran tersebut agar dapat diserahkan atau diberikan tepat waktu.

Sedangkan permasalahan pada akuntabilitas ialah dimana beberapa anggaran yang telah dianggarkan untuk pembangunan lain, harus

digunakan untuk pembangunan rumah isolasi untuk penyintas covid 19, sedangkan anggaran tersebut telah diprioritaskan untuk pembangunan beberapa daerah, namun harus diahli fungsikan sebagai dana anggaran covid 19, tidak hanya hal tersebut, permasalahan pada akuntabilitas ialah dimana Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin mengajukan penambahan ABT, ABT yang dimaksud ialah anggaran tambahan yang diajukan akibat adanya kebutuhan dana tambahan disebabkan beban biaya yang melebihi anggaran ataupun tambahan kegiatan yang belum terealisasi, hal ini menandakan bahwa perencanaan anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin belum matang.

Penelitian dengan judul yang sama sebelumnya pernah dilakukan oleh Eka jas (2014) dengan judul Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Publik, Desentralisasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah (Studi Pada Skpd Kabupaten Kuantan Singingi). Hasil dari penelitian ini yaitu Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (2) Akuntabilitas Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), (3) Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), (4) Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Publik, Desentralisasi, dan Sistem Pengendalian Intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pada penelitian Dina Afrina (2015) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Persepsian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian intern dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja lembaga publik. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya peneliti pun terPartisipasi Penyusunan Anggaran untuk meneliti kembali

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian yang diambil oleh peneliti yang dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung dan sedangkan peneliti sendiri objek penelitian yang digunakan yaitu Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin. Perbedaan lainnya terletak pada variabel dependen yang peneliti gunakan. Maka dari itu berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini lebih lanjut dengan judul "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi 9 Penyusunan Anggaran, dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan

2. LANDASAN TEORI

Manajemen Keuangan

Manajer Keuangan memegang peranan yang sangat penting. Dalam perkembangannya, tugas Manajer Keuangan tidak hanya mencatat, membuat laporan, mengendalikan posisi kas, membayar tagihan-tagihan dan mencari dana. Manajer Keuangan juga harus mampu menginvestasikan dana, mengatur kombinasi sumber dana yang optimal, serta pendistribusian keuntungan (pembagian dividen) dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Setiap perusahaan selalu membutuhkan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari maupun untuk mengembangkan perusahaan. Kebutuhan dana tersebut berupa modal kerja maupun untuk pembelian aktiva tetap. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, perusahaan harus mampu mencari sumber dana dengan komposisi yang menghasilkan beban biaya paling murah.

Menurut Peter (2018:1), Manajemen Keuangan Perusahaan adalah salah satu bidang manajemen fungsional perusahaan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi jangka panjang dan pengelolaan modal kerja perusahaan yang meliputi investasi dan pendanaan jangka pendek. Dengan kata lain manajemen keuangan perusahaan merupakan bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam suatu organisasi perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan nilai melalui pengambilan

keputusan dan pengelolaan sumber daya yang tepat. Menurut Utari (2018:1).

Manajemen Keuangan adalah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan pencarian dana dengan biaya yang serendah-rendahnya dan menggunakannya secara efektif dan efisien untuk kegiatan operasi organisasi. Manajemen Keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana yang baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan untuk pembiayaan investasi atau pembelajaran secara efisien. Dari teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa Manajemen Keuangan merupakan usaha pengelolaan dana yang dikumpulkan dan dialokasikan untuk membiayai segala aktivitas perusahaan dalam rangka mencapai tujuan dari perusahaan tersebut (Harahap, 2018).

1. Fungsi Manajemen Keuangan

Tugas utama Manajemen Keuangan adalah mengambil keputusan yang mencakup perusahaan dalam memperoleh dana dan juga cara mengalokasikan dana tersebut. Dari pengertian tersebut, ada fungsi manajemen keuangan (Harahap, 2018) yaitu sebagai berikut:

- a. Penggunaan dana (Keputusan Investasi)
- b. Memperoleh Dana (keputusan pendanaan)
- c. Pembagian laba (kebijakan dividen)

Keputusan investasi akan tercermin pada sisi aktiva perusahaan. Dengan demikian akan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Sebaliknya keputusan pendanaan dan kebijakan dividen akan tercermin pada sisi pasiva perusahaan. Apabila hanya memperhatikan dana yang tertanam dalam jangka waktu yang lama, maka perbandingan tersebut sebagai struktur modal. Apabila diperhatikan baik dana jangka pendek maupun dana jangka panjang, perbandingan disebut sebagai struktur finansial. Keputusan pendanaan dan kebijakan dividen mempengaruhi kedua struktur tersebut.

2. Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan Manajemen Keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian yang dilakukan oleh Manajer Keuangan. Untuk mempertahankan

keberlangsungan operasional perusahaan, banyak keputusan keuangan yang perlu diambil oleh Manajer Keuangan. Keputusan keuangan dapat diambil dengan benar apabila hal tersebut sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Secara umum tujuan manajemen keuangan dalam jangka pendek adalah menghasilkan laba yang optimal. Agar para pemilik dapat menerima return yang lebih besar dari investasi yang dilakukan perusahaan selama kegiatan operasionalnya. Namun secara normatif tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. (Harahap, 2018)

Kinerja Manajerial Wahyuni (2014) kinerja manajerial adalah kinerja para individu pegawai organisasi dalam kegiatan manajerial, yang diukur dengan menggunakan indikator: Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akan datang. melakukan pemeriksaan melalui pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan.

3. Koordinasi, menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan.
4. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap rencana yang telah dibuat, dan ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan hasil kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang diperlukan.
5. Pengawasan, yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan dilaporkan atau kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, membimbing, menjelaskan segala aturan yang berlaku, mempertahankan bawahan dalam suatu unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan mempromosikan pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja lainnya.

7. Negoisasi, yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian, penjualan atau kontrak untuk barang-barang dan jasa.
8. Perwakilan, yaitu menyampaikan informasi tentang visi, misi, dan kegiatan-kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis dan konsultasi dengan kantor-kantor lain. Kinerja manajerial merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang manajer dalam melaksanakan tugasnya secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Ingkiriwang, 2013).

Berikut ini penjelasan dari beberapa macam tipe akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Internal Berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah, dimana setiap pejabat/petugas publik baik individu/kelompok berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada atasan mengenai perkembangan kinerja/hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan akuntabilitas internal pemerintah tersebut, telah diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Akuntabilitas Eksternal Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggung jawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya

Kinerja Anggaran

1. Pengertian Kinerja Anggaran

Kemenkeu (2018) menjelaskan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam sistem perencanaan penganggaran belanja Negara yang menunjukkan secara jelas keterkaitan antara alokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan atas alokasi belanja tersebut serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja. Mahmudi (2018) menjelaskan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran

(*input*) dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Menurut Halim dan Kusufi (2018), anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional dan anggaran kinerja menekankan pada konsep *value for money*.

Menurut Mardiasmo (2018) dalam indikator Value for Money terdapat konsep yang dikenal dengan 3E yaitu sebagai berikut :

- 1). Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan *masukan (cash of input)*. Dalam pengertian ekonomi (hemat atau tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan.
- 2). Efisiensi, sangat berhubungan erat dengan produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan.
- 3). Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Menurut Nordiawan (2018) terdapat beberapa karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja yaitu sebagai berikut :

- 1). Mengklasifikasikan akun-akun dalam anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas serta unit organisasi dan rincian belanja.
- 2). Menyelidiki dan mengukur aktivitas guna mendapatkan efisiensi maksimum dan standar biaya.
- 3). Mendasarkan anggaran untuk periode yang akan datang pada biaya per unit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan harus dilakukan pada periode tersebut.

Bastian (2018) menjelaskan bahwa setelah diterapkannya anggaran berbasis kinerja ternyata memiliki keunggulan, yaitu meliputi :

- 1). Memungkinkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan.
- 2). Merangsang partisipasi dan mePartisipasi Penyusunan Anggaran unit kerja melalui proses pengusulan dan penilaian anggaran yang bersifat faktual.
- 3). Membantu fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatan keputusan.

- 4). Memungkinkan alokasi dana secara optimal dengan didasarkan pada efisiensi unit kerja.
- 5). Menghindarkan pemborosan.

Menurut Kementerian Keuangan (2016) ruang lingkup di dalam penganggaran berbasis kinerja dibagi dalam beberapa lingkup, yaitu sebagai berikut :

- 1). Menentukan visi dan misi (yang mencerminkan strategi organisasi), tujuan, sasaran, dan target Dalam penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target merupakan tahap pertama yang harus ditetapkan suatu organisasi dan menjadi tujuan tertinggi yang hendak dicapai sehingga setiap indikator kinerja harus dikaitkan dengan komponen tersebut. Oleh karena itu, penentuan komponen-komponen tidak hanya ditentukan oleh pemerintah tetapi juga mengikutsertakan masyarakat sehingga dapat diperoleh informasi mengenai kebutuhan publik.
- 2). Menentukan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan bermanfaat (berfungsi).

Menurut Kemenkeu (2015) indikator kinerja meliputi:

- 1) Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif
- 2) Revisi Halaman III DIPA, dapat dilakukan penghitungan rencana penarikan dana seakurat mungkin, karena rencana penarikan dana pada halaman III DIPA akan menjadi dasar pembuatan perkiraan pencairan dana harian.
- 3) Pagu Minus, dapat mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus secepat mungkin
- 4) Menyampaikan data kontrak secara tepat waktu (Maksimal 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani).
- 5) Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Uang Persediaan (UP) minimal *direvolving* satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkali-kali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan

- satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/disetor.
- 6) Rekon Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), rekon disampaikan ke KPPN secara tepat waktu (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
- 7) Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM
- 8) Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proposional sesuai target penyerapan anggaran.
- 9) Penyelesaian tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja serah terima/penyelesaian pekerjaan).
- 10) Konfirmasi Capaian *Output*, disampaikan setelah 10 hari bulan berikutnya. bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran
- 11) Retur SP2D yang diakibatkan kesalahan penulisan rekening/ rekening tidak aktif. Halaman III DIPA untuk meningkatkan akurasi pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.
- 12) Renkas, akurasi perencanaan kas agar menjadi perhatian dan disampaikan ke KPPN sebelum jatuh tempo perencanaan kas tersebut yaitu sehari sebelumnya jatuh tempo RPD harian pada pukul 12.00.
- 13) Kesalahan SPM yang diakibatkan kekurangtelitian, sehingga tidak dapat di proses oleh sistem KPPN.

b. Evaluasi dan pengambilan keputusan terhadap pemilihan dan prioritas program Dalam kegiatan ini meliputi penyusunan peringkat-peringkat alternatif dan selanjutnya mengambil keputusan atas program/kegiatan yang dianggap menjadi prioritas. Dilakukannya pemilihan dan prioritas program/kegiatan mengingat sumber daya yang terbatas.

c. Analisa Standar Biaya (ASB) ASB merupakan standar biaya suatu program atau kegiatan sehingga alokasi anggaran menjadi lebih rasional. Dilakukannya ASB dapat meminimalisir kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk melonggarkan alokasi anggaran pada tiap-tiap unit kerja sehingga anggaran tersebut tidak efisien.

Dalam menyusun ABK perlu memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, perolehan data dalam membuat keputusan anggaran, siklus

perencanaan anggaran daerah, struktur APBN atau APBD, dan penggunaan ASB. Dalam menyusun ABK yang perlu mendapat perhatian adalah memperoleh data kuantitatif dan membuat keputusan penganggarnya. Menurut Yuwono, Indrajaya, dan Hariyandi (2018) terdapat persyaratan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja dengan baik di lembaga pemerintah daerah yaitu:

- 1). Pertama, keterlibatan DPRD dalam perencanaan anggaran karena DPRD merupakan wakil dari masyarakat sehingga dalam proses perencanaan anggaran harus dilibatkan agar menimbulkan konsekuensi DPRD yang harus proaktif dan dapat menetapkan dua pokok hal yaitu arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD.
- 2). Kedua, adanya desentralisasi wewenang hingga ke level unit kerja sebagai pusat pertanggungjawaban. Dalam hal ini anggaran digunakan untuk alokasi sejumlah dana kepada unit kerja untuk mengelola sumber dana yang ada.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 39 Ayat 2 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Selanjutnya, dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dijelaskan bahwa untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan sebagai berikut :

- a) Penerapan serta jelas tujuan dan sasaran, hasil, dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
- b) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

3. PEMBAHASAN

1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja Manajerial pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, dari hasil analisis maka hipotesis terbukti, hal tersebut dilihat dari nilai P Value yang kurang dari 0,05 yaitu 0,012 dan memiliki original sampel yang positif yaitu 0.112.

Maka sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu pegawai memahami persis apa yang harus Pegawai lakukan dalam pekerjaan Pegawai, Pegawai memahami bagaimana kinerja Pegawai diukur, Pegawai memiliki sasaran yang jelas yang membantu Pegawai dalam melakukan pekerjaan, Pegawai mempunyai batas waktu untuk mencapai sasaran pekerjaan, Jika Pegawai mempunyai lebih dari satu sasaran untuk dicapai, Pegawai mengetahui mana yang paling penting dan yang kurang penting, Sasaran dalam pekerjaan Pegawai cukup menantang, tetapi layak (tidak terlalu mudah maupun sulit), Dalam instansi ini, tim bekerja sama untuk mencapai sasaran

Menurut Ahmad Rudi (2019:209) kejelasan Anggaran adalah sebagai berikut: “Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut”.

Penelitian ini Sejalan dengan penelitian Intan lesmana, 2019, yang menyatakan bahwa kejelasan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

2. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, dari hasil analisis maka hipotesis terbukti, hal tersebut dilihat dari nilai P Value yang kurang dari 0,05 yaitu 0,000 dan memiliki original sampel yang positif yaitu 0.572

Maka sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu Pegawai ikut dan terlibat dalam penyusunan semua anggaran, Menurut Pegawai dilakukannya revisi anggaran adalah masuk akal, Usulan anggaran dari Pegawai berpengaruh dalam anggaran akhir, Atasan Pegawai sering meminta pendapat bawahan dalam proses penyusunan anggaran

Menurut M. Nafarin (2012:11), definisi partisipasi penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: “Partisipasi penyusunan anggaran adalah tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu di dalam menentukan dan menyusun anggaran yang ada di dalam divisi atau bagiannya, baik secara periodik maupun tahunan.”

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Syafitra H. 2018, yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

3. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, dari hasil analisis maka hipotesis terbukti, hal tersebut dilihat dari nilai P Value yang kurang dari 0,05 yaitu 0,027 dan memiliki original sampel yang positif yaitu 0.275 Maka sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa dana masyarakat menghasilkan output maksimal, Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan publik, Pelaksanaan program-program APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Anggaran yang diusulkan mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang ditetapkan Pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur yang berlaku Penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku Audit kepatuhan dilakukan agar setiap penggunaan dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan tanggungjawab, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi amanah yaitu masyarakat. Maka penelitian ini sejalan dengan penelitian Silvia Andarina, 2018, yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja manajerial

4. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, dari hasil analisis maka hipotesis terbukti, hal tersebut dilihat dari nilai P Value yang kurang dari 0,05 yaitu 0,043 dan memiliki original sampel yang positif yaitu 0.069

Maka sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu pegawai memahami persis apa yang harus Pegawai lakukan dalam pekerjaan Pegawai, Pegawai memahami bagaimana kinerja

Pegawai diukur, Pegawai memiliki sasaran yang jelas yang membantu Pegawai dalam melakukan pekerjaan, Pegawai mempunyai batas waktu untuk mencapai sasaran pekerjaan, Jika Pegawai mempunyai lebih dari satu sasaran untuk dicapai, Pegawai mengetahui mana yang paling penting dan yang kurang penting, Sasaran dalam pekerjaan Pegawai cukup menantang, tetapi layak (tidak terlalu mudah maupun sulit), Dalam instansi ini, tim bekerja sama untuk mencapai sasaran

Menurut Ahmad Rudi (2019:209) kejelasan Anggaran adalah sebagai berikut: “Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut”.

Sejalan dengan penelitian Intan lesmana, 2019, yang menyatakan bahwa kejelasan anggaran berpengaruh terhadap kinerja anggaran.

5. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, dari hasil analisis maka hipotesis terbukti, hal tersebut dilihat dari nilai P Value yang kurang dari 0,05 yaitu 0,001 dan memiliki original sampel yang positif yaitu 0.110

Maka sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu Pegawai ikut dan terlibat dalam penyusunan semua anggaran, Menurut Pegawai dilakukannya revisi anggaran adalah masuk akal, Usulan anggaran dari Pegawai berpengaruh dalam anggaran akhir, Atasan Pegawai sering meminta pendapat bawahan dalam proses penyusunan anggaran

Menurut M. Nafarin (2012:11), definisi partisipasi penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: “Partisipasi penyusunan anggaran adalah tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu di dalam menentukan dan menyusun anggaran yang ada di dalam divisi atau bagiannya, baik secara periodik maupun tahunan.”

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tessa, 2013, yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja anggaran.

6. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, dari hasil analisis maka hipotesis terbukti, hal tersebut dilihat dari nilai P Value yang kurang dari 0,05 yaitu 0,000 dan memiliki original sampel yang positif yaitu 0.756

Maka sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa dana masyarakat menghasilkan output maksimal, Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan publik, Pelaksanaan program-program APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Anggaran yang diusulkan mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang ditetapkan Pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur yang berlaku Penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku Audit kepatuhan dilakukan agar setiap penggunaan dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku

Menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan tanggungjawab, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi amanah yaitu masyarakat.

Maka penelitian ini sejalan dengan penelitian Silvia Andarina, 2018, yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja manajerial

7. Kinerja manajerial berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, dari hasil analisis maka hipotesis terbukti, hal tersebut dilihat dari nilai P Value yang kurang dari 0,05 yaitu 0,013 dan memiliki original sampel yang positif yaitu 0.106

Maka sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu Perencanaan Pegawai berperan dalam penentuan tujuan, kebijakan rencana kegiatan seperti penjadwalan kerja, penyusunan anggaran dan penyusunan program Investigasi Pegawai, berperan dalam pengumpulan dan penyiapan informasi yang biasanya berbentuk catatan dan laporan, Pengkoordinasian Pegawai ikut

berperan dalam tukar menukar informasi dalam organisasi untuk mengkoordinasikan dan menyesuaikan laporan, Evaluasi Pegawai berperan dalam mengevaluasi dan menilai rencana kerja, laporan kinerja maupun kerja yang diamati pada unit/sub unit Pegawai, Pengawasan Pegawai berperan dalam mengarahkan, memimpin dan mengembangkan para bawahan yang ada pada unit/ sub unit Pegawai, Negosiasi Pegawai berperan dalam melakukan kontrak untuk barang / jasa yang dibutuhkan pada unit / sub unit Pegawai dengan pihak luar, Perwakilan Pegawai berperan dalam mewakili organisasi Pegawai untuk berhubungan dengan pihak lain diluar organisasi, Kinerja secara menyeluruh Pegawai mengevaluasi kinerja, dan sasaran kinerja secara menyeluruh

Kinerja manajerial menurut Mahoney dalam Desi Yulianti (2014:12) diartikan sebagai : Kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan manajerial, antara lain perencanaan, investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staf (staffing), negosiasi dan representasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Andhika Prawira, 2019, yang menyatakan bahwa kinerja manajerial mempengaruhi kinerja anggaran.

8. Kinerja Manajerial memediasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, dari hasil analisis maka hipotesis terbukti, hal tersebut dilihat dari nilai P Value yang kurang dari 0,05 yaitu 0,000 dan memiliki original sampel yang positif yaitu 0.529, dan diketahui bahwa pengaruh tidak langsung memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan dengan pengaruh langsung dilihat dari t statistik yaitu $5.408 > 2.018$

Maka sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu pegawai memahami persis apa yang harus Pegawai lakukan dalam pekerjaan Pegawai, Pegawai memahami bagaimana kinerja Pegawai diukur, Pegawai memiliki sasaran yang jelas yang membantu Pegawai dalam melakukan pekerjaan, Pegawai mempunyai batas waktu untuk mencapai sasaran pekerjaan, Jika Pegawai mempunyai lebih dari satu sasaran untuk dicapai, Pegawai mengetahui mana yang paling penting dan yang kurang penting, Sasaran

dalam pekerjaan Pegawai cukup menantang, tetapi layak (tidak terlalu mudah maupun sulit), Dalam instansi ini, tim bekerja sama untuk mencapai sasaran

Menurut Ahmad Rudi (2019:209) kejelasan Anggaran adalah sebagai berikut: “Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut”.

9. Kinerja Manajerial memediasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, hal tersebut dilihat dari nilai P Value yang kurang dari 0,05 yaitu 0,020 dan memiliki original sampel yang positif yaitu 0.072, dan diketahui bahwa pengaruh tidak langsung memiliki pengaruh lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung dilihat dari t statistik yaitu $3.391 > 2.335$

Maka sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu Pegawai ikut dan terlibat dalam penyusunan semua anggaran, Menurut Pegawai dilakukannya revisi anggaran adalah masuk akal, Usulan anggaran dari Pegawai berpengaruh dalam anggaran akhir, Atasan Pegawai sering meminta pendapat bawahan dalam proses penyusunan anggaran

Menurut M. Nafarin (2012:11), definisi partisipasi penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: “Partisipasi penyusunan anggaran adalah tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu di dalam menentukan dan menyusun anggaran yang ada di dalam divisi atau bagiannya, baik secara periodik maupun tahunan.”

10. Kinerja Manajerial memediasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, hal tersebut dilihat dari nilai P Value yang kurang dari 0,05 yaitu 0,013 dan memiliki original sampel yang positif yaitu 0.107, dan diketahui bahwa pengaruh tidak langsung memiliki pengaruh lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung dilihat dari t statistik yaitu $2.499 < 23.065$

Maka sesuai dengan fenomena yang terjadi yaitu Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa dana masyarakat menghasilkan output maksimal, Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan publik, Pelaksanaan program-program APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Anggaran yang diusulkan mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang ditetapkan Pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur yang berlaku Penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku Audit kepatuhan dilakukan agar setiap penggunaan dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku

Menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan tanggungjawab, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja Manajerial pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
2. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
3. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
4. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
5. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin

6. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
7. Kinerja manajerial berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
8. Kinerja Manajerial memediasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
9. Kinerja Manajerial memediasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
10. Kinerja Manajerial memediasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan untuk hasil penelitian dan pembahasan, sebagai berikut:

1. Maka sebaiknya Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin pegawai memahami persis apa yang harus Pegawai lakukan dalam pekerjaan Pegawai, Pegawai memahami bagaimana kinerja Pegawai diukur.
2. Pegawai memiliki sasaran yang jelas yang membantu Pegawai dalam melakukan pekerjaan, Pegawai mempunyai batas waktu untuk mencapai sasaran pekerjaan, Jika Pegawai mempunyai lebih dari satu sasaran untuk dicapai, Pegawai mengetahui mana yang paling penting dan yang kurang penting, Sasaran dalam pekerjaan Pegawai cukup menantang, tetapi layak (tidak terlalu mudah maupun sulit), Dalam instansi ini, tim bekerja sama untuk mencapai sasaran
3. Maka sebaiknya Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Pegawai ikut dan terlibat dalam penyusunan semua anggaran, Menurut Pegawai dilakukannya revisi anggaran adalah masuk akal, Usulan anggaran dari Pegawai berpengaruh dalam anggaran akhir, Atasan Pegawai sering meminta pendapat bawahan dalam proses penyusunan anggaran
4. Maka sebaiknya Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Program-program anggaran dirancangkan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa dana masyarakat menghasilkan output maksimal.
5. Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan publik, Pelaksanaan program-program APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Anggaran yang diusulkan mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang ditetapkan Pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur yang berlaku
6. Penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku Audit kepatuhan dilakukan agar setiap penggunaan dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku
7. Maka sebaiknya Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Perencanaan Pegawai berperan dalam penentuan tujuan, kebijakan rencana kegiatan seperti penjadwalan kerja, penyusunan anggaran dan penyusunan program Investigasi Pegawai, berperan dalam pengumpulan dan penyiapan informasi yang biasanya berbentuk catatan dan laporan
8. Pengkoordinasian Pegawai ikut berperan dalam tukar menukar informasi dalam organisasi untuk mengkoordinasikan dan menyesuaikan laporan, Evaluasi Pegawai berperan dalam mengevaluasi dan menilai rencana kerja, laporan kinerja maupun kerja yang diamati pada unit/sub unit Pegawai
9. Pengawasan Pegawai berperan dalam mengarahkan, memimpin dan mengembangkan para bawahan yang ada pada unit/ sub unit Pegawai, Negosiasi Pegawai berperan dalam melakukan kontrak untuk barang / jasa yang dibutuhkan pada unit / sub unit Pegawai dengan pihak luar.
10. Perwakilan Pegawai berperan dalam mewakili organisasi Pegawai untuk berhubungan dengan pihak lain diluar organisasi, Kinerja secara menyeluruh

Pegawai mengevaluasi kinerja, dan sasaran kinerja secara menyeluruh

Reformasi.Jakarta:PT Semesta Rakyat Merdeka

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim & Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Adnyana, Putra. (2013). *Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Hubungan Antara Kinerja Dengan Nilai Perusahaan*. E-Journal Universitas Udayana. Vol. 5, No.3, 2013.
- Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Afrina, Dina. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan (Studi Persepsian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)*. Falkutas Ekonomi, Universitas Riau. JOM FEKON Vol. 2.
- Agus Harjito dan Martono, 2011. *Manajemen Keuangan, Edisi Kedua, Cetakan Pertama*. Yogyakarta; Ekonisia
- Amril, Vonny nofisa. (2014). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Skpd (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung)*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Bangun, Andarias. (2009). *Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)*. (Tesis).
- Fahmi, Irham. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka
- Garrison, R. H., Noreen, E. W., Brewer, P. C. (2006). *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba empat. Edisi 1. Halaman 11
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Univeritas Diponegoro.
- Grahita, Chandrarin. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitati*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur Dan Supomo. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Khaerul, Umam. (2010). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lubis, A. I. (2011). *Akuntansi keperilakuan*. Jakarta. Penerbit salemba empat, Edisi kedua. Halaman 358, 380. ISBN: 978-979-061-048-4
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., Purwanugraha, H. A. (2006). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta. Penerbit BPFE Edisi pertama. Halaman 145. ISBN: 979-503-492-8.
- Mardiasmo., 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- Mowen / Hansen. (2013). *Akuntansi Manajerial*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nengsy, Herda. (2107). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Manajerial PT. Perkebunan Nusantara V, Pekanbaru*. Falkutas Ekonomi. Jurusan Akuntansi

- Universitas Islam Indragiri Tembilahan
Jurnal akuntansi dan keuangan. Vol. 6.
- Ni Kadek Astini, dkk. (2014). *Pengaruh Akuntabilitas Publik Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Di Kabupaten Klungkung*. E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Vol 2 No: 10.
- Nurchayani. (2010). *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi Dan Persepsi Inovasi Sebagai Variabel Intervening*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Putra, Deki. (2013). *Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Putri, Gustika Yolanda. (2013). *Pengaruh Komitmen Organisasi Sistem Pengendalian Intren Pemerintah (SPIP) Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)*. Universitas negeri padang.
- Putri, Natalia Dewinda. (2010). *Pengaruh Komitmen Organisasional Dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Kabupaten Tegal*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Rahardjo, Adisasmita. (2011). *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*.
- Rizal, Djail. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Edisi 1 Jakarta: Semester Rakyat Merdeka.
- Robbins, S. P., Judge, T. A. *Perilaku Organisasi*. (2016). Jakarta: Salemba empat. Edisi 16. Halaman 336. ISBN: 978-979-061-515-1
- Sari, Desak Putu Intan Permata Sari, Ni Kadek Sinarwati dan Edy Sujana. (2014) *Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng)*. Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 1.
- Sekaran, dkk. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Kemampuan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Setiawan, Eko. (2014). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Suwardjono. (2010). *Teori Akuntansi: Pengungkapan dan Sarana Interpretatif*. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Suyanto. (2011). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Pada Pejabat Eselon II Dan III Di Skpd Kota Metro*. Universitas Metro Lampung).
- Solina, Meria. (2014). *Pengaruh Akuntabilitas Publik Partisipasi Penyusunan Anggaran Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada Skpd Kota Tanjung Pinang*. Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji Fakultas Ekonomi Tanjung Pinang
- Ulum, Ihyaul. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Graha Ilmu Yogyakarta.